

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-SAKIP DALAM MENINGKATKAN KINERJA RUMAH SAKIT PUBLIK: STUDI KASUS RSUD KELAS A DI INDONESIA

Rinadini Hendrasworo¹

¹Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Corresponding author: rinadina181@gmail.com

Abstract

The implementation of E-SAKIP in public hospitals faces significant challenges due to service complexity, limited resources, and high service quality demands. Public hospitals are expected not only to provide optimal healthcare services but also to be accountable for the use of public resources. Despite the high urgency of implementing E-SAKIP, its implementation is still hindered by issues such as limited human resource capacity, complex reporting procedures, resistance to change, and the suboptimal integration of digital systems with organizational work practices. This study aims to analyze the effectiveness of E-SAKIP implementation in improving the performance of public hospitals, focusing on a case study of a Class A Regional General Hospital (RSUD) in Indonesia. A descriptive qualitative approach is used, with data collection techniques including document study, observation, and literature review. The findings indicate that although E-SAKIP implementation has had a positive impact on performance improvement and internal coordination, there are still significant challenges related to human resources and reporting complexity.

Keywords: Efektifitas, Implementasi, Kinerja

Introduction

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda strategis di berbagai negara sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi administrasi publik tidak hanya dipandang sebagai adopsi teknologi semata, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong reformasi birokrasi yang mengarah pada perubahan struktural dan kultural dalam organisasi publik[1][2]. Dalam konteks ini, sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital diyakini dapat memperkuat mekanisme pengendalian kinerja serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Di Indonesia, salah satu kebijakan utama dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi secara elektronik melalui E-SAKIP. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan[3][4]. Penerapan E-SAKIP diharapkan dapat mendorong terciptanya prinsip good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja organisasi sektor publik[5]. Pada sektor kesehatan, khususnya rumah sakit publik, penerapan E-SAKIP memiliki urgensi yang lebih tinggi mengingat kompleksitas layanan, keterbatasan sumber daya, serta tingginya tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat. Rumah sakit publik tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara akuntabel dan terukur. Oleh karena itu, efektivitas implementasi E-SAKIP menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi rumah sakit. [6]

Namun, dalam penelitian ini, kami akan membahas lebih dalam bagaimana penerapan E-SAKIP di rumah sakit publik tidak hanya terbatas pada prosedur administratif yang bersifat formal, tetapi juga menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural dalam organisasi rumah sakit. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi E-SAKIP ini antara lain adalah kompleksitas prosedur pelaporan yang harus dilalui, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih untuk

menggunakan sistem digital ini, serta resistensi terhadap perubahan yang muncul dari budaya organisasi yang sudah mapan[7]. Berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan pengukuran angka dan data statistik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang memengaruhi penerapan E-SAKIP di rumah sakit publik.

Rumah sakit publik memiliki karakteristik organisasi yang unik, baik dari sisi struktur organisasi, proses kerja, maupun dinamika pelayanan yang terjadi di dalamnya[8]. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara lebih detail pengalaman, pandangan, serta persepsi individu yang terlibat langsung dalam implementasi E-SAKIP. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana rumah sakit mengadaptasi sistem E-SAKIP, serta bagaimana berbagai pihak di dalam organisasi berinteraksi dengan sistem tersebut dalam konteks spesifik rumah sakit. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya sekadar mengumpulkan data yang bersifat numerik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konteks sosial dan organisasi yang mempengaruhi implementasi sistem[9][10].

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, observasi langsung terhadap proses kerja yang ada di rumah sakit, serta telaah dokumentasi terkait penerapan E-SAKIP. Dengan menggunakan pendekatan ini, kami dapat mengidentifikasi dengan lebih jelas tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital, serta menemukan faktor-faktor keberhasilan yang dapat diadopsi oleh rumah sakit lain dalam mengoptimalkan sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana E-SAKIP diimplementasikan dalam lingkungan rumah sakit, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai adaptasi sistem ini terhadap dinamika dan kebutuhan rumah sakit publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja rumah sakit publik melalui studi kasus di RSUD kelas A di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi E-SAKIP, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks rumah sakit publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang penting bagi pengembangan kajian akuntabilitas kinerja sektor publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan manajemen rumah sakit dalam mengoptimalkan sistem akuntabilitas berbasis digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja rumah sakit publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada analisis proses, konteks organisasi, serta dinamika implementasi kebijakan publik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata [11]. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji sistem akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan perilaku organisasi, yang memerlukan pemahaman yang lebih holistik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam konteks rumah sakit publik.

Penelitian dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas A di Indonesia, yang berfungsi sebagai rumah sakit rujukan dan telah menerapkan E-SAKIP dalam sistem pengelolaan kinerjanya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingkat kompleksitas organisasi, cakupan layanan yang luas, serta peran strategis rumah sakit publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah, yang menjadikan RSUD kelas A sebagai representasi dari rumah sakit publik dengan tantangan yang lebih besar dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital [6]. Dengan demikian, RSUD kelas A menjadi pilihan yang tepat untuk menilai efektivitas implementasi E-SAKIP pada tingkat rumah sakit rujukan yang memiliki karakteristik dan dinamika organisasi yang khas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan telaah literatur. Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, laporan E-SAKIP, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai proses

implementasi E-SAKIP dan praktik pelaporan kinerja di lingkungan rumah sakit. Selain itu, telaah literatur digunakan untuk memperkuat analisis dengan mengaitkan temuan penelitian dengan hasil studi terdahulu yang relevan dalam bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi digital, serta untuk memberikan konteks teoritis yang lebih luas terhadap temuan penelitian ini [5][2].

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Dalam proses analisis ini, peneliti memfokuskan perhatian pada identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana E-SAKIP mempengaruhi kinerja organisasi rumah sakit. Kerangka analisis yang digunakan adalah efektivitas organisasi, yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kerangka ini digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai sejauh mana implementasi E-SAKIP mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi rumah sakit secara komprehensif dan berkelanjutan [9].

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data guna meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian [11]. Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan yang lebih objektif dan valid mengenai efektivitas implementasi E-SAKIP, serta untuk mengurangi potensi bias yang dapat muncul dari satu sumber data atau teknik pengumpulan data saja.

Results

Efektivitas implementasi E-SAKIP pada rumah sakit publik dianalisis menggunakan kerangka efektivitas organisasi yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kerangka ini memungkinkan evaluasi implementasi E-SAKIP tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari proses dan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem akuntabilitas berbasis digital [9]. Dimensi pencapaian tujuan berfokus pada sejauh mana E-SAKIP dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi rumah sakit melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam hal ini, rumah sakit tidak hanya diukur dari seberapa baik mereka melaksanakan tugas administratif, tetapi juga apakah hasil yang diharapkan dalam perencanaan kinerja tercapai secara efektif dan efisien. Integrasi mengacu pada sejauh mana sistem E-SAKIP dapat diintegrasikan ke dalam proses kerja rumah sakit dan diterima oleh seluruh bagian organisasi. Hal ini mencakup bagaimana sistem ini bekerja bersinergi dengan berbagai fungsi rumah sakit, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan kesehatan, yang memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan hasil yang optimal. Adaptasi menggambarkan kemampuan rumah sakit untuk beradaptasi dengan sistem digital yang terus berkembang. Sistem E-SAKIP yang berbasis teknologi memerlukan proses penyesuaian baik dalam hal keterampilan sumber daya manusia maupun budaya organisasi. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini tidak hanya dilihat dari pengaplikasian teknisnya, tetapi juga dari seberapa cepat dan efektif rumah sakit dapat mengatasi hambatan yang terkait dengan perubahan budaya dan pola kerja yang ada.

Kerangka efektivitas organisasi ini juga mempertimbangkan berbagai tantangan yang muncul akibat penerapan sistem berbasis digital di sektor publik. Rumah sakit publik, sebagai lembaga yang berfokus pada pelayanan, sering kali menghadapi hambatan struktural dan budaya yang cukup kompleks, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi, serta ketergantungan pada sistem lama yang sudah berjalan lama. Meskipun E-SAKIP dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tantangan dalam hal integrasi dan adaptasi tetap menjadi faktor kunci yang memengaruhi sejauh mana implementasi sistem ini dapat berhasil dalam meningkatkan kinerja rumah sakit. Evaluasi efektivitas sistem ini menjadi semakin relevan ketika dipahami dalam konteks rumah sakit yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai organisasi yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Selanjutnya, dalam analisis ini, hasil implementasi E-SAKIP akan dikaitkan dengan temuan-temuan empiris yang relevan, yang mengungkap bagaimana rumah sakit publik menghadapi dan mengatasi berbagai hambatan dalam menjalankan sistem akuntabilitas berbasis digital. Penelitian ini juga akan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pengaruh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dukungan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem E-SAKIP di rumah sakit. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas implementasi E-SAKIP, tidak hanya dilihat dari hasil administratif, tetapi juga dari perspektif organisasi yang lebih holistik dan dinamis.

1. Integrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-SAKIP di RSUD kelas A di Indonesia telah mendorong peningkatan koordinasi internal antarunit kerja di lingkungan rumah sakit. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan integrasi ini adalah proses sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Melalui kegiatan ini, pegawai rumah sakit menjadi lebih memahami mekanisme pelaporan kinerja berbasis digital dan cara penggunaannya. Integrasi sistem E-SAKIP dalam berbagai unit kerja tercermin dari meningkatnya konsistensi dalam pelaporan kinerja antarbidang, serta meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses kerja rumah sakit.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala dalam proses integrasi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya tumpang tindih format pelaporan dan perbedaan pemahaman antarunit kerja. Perbedaan interpretasi terhadap indikator kinerja dan mekanisme pengisian E-SAKIP menyebabkan ketidakkonsistenan data yang dilaporkan. Integrasi sistem belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi prosedur kerja dan standar operasional yang seragam di seluruh unit. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan integrasi sistem digital dalam organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform teknologi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi internal dan kejelasan pembagian peran dalam proses akuntabilitas kinerja [5][2][15]. Oleh karena itu, agar integrasi dapat berjalan lebih efektif, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam menyelaraskan prosedur kerja antarunit serta memberikan pelatihan yang lebih mendalam bagi pegawai.

2. Adaptasi

Pada dimensi adaptasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit publik telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan penerapan E-SAKIP. Adaptasi ini tercermin dari tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet yang memadai, serta pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal. Proses adaptasi yang baik ini menjadi faktor penting dalam mendukung kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan sistem akuntabilitas berbasis digital yang lebih kompleks.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adaptasi rumah sakit masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait dengan belum terpusatnya personel yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pengelolaan dan pengisian E-SAKIP. Keadaan ini menyebabkan variasi kualitas pelaporan kinerja antarunit kerja dan berpotensi menurunkan konsistensi data kinerja organisasi. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor publik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kejelasan struktur pengelolaan sistem [1][11][16]. Oleh karena itu, untuk mencapai adaptasi yang lebih baik, rumah sakit perlu menunjuk personel khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem E-SAKIP dan menyediakan pelatihan lebih lanjut untuk memastikan seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan sistem baru ini secara efektif.

3. Pencapaian Tujuan

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi E-SAKIP pada RSUD kelas A di Indonesia secara umum telah berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini tercermin dari peningkatan capaian indikator kinerja utama rumah sakit, khususnya pada aspek mutu pelayanan,

aksesibilitas layanan, dan peningkatan kemandirian keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa E-SAKIP berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja yang membantu organisasi dalam memantau pencapaian target secara lebih terstruktur dan terukur. Dengan demikian, E-SAKIP berhasil memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas manajemen rumah sakit dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan capaian kinerja ini juga mengindikasikan bahwa sistem E-SAKIP mampu mendorong keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja rumah sakit. Pencapaian tujuan ini menunjukkan bahwa E-SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dari siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dapat memperkuat orientasi hasil dalam organisasi sektor publik [13][14]. Dengan adanya E-SAKIP, proses evaluasi kinerja tidak lagi sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas yang berkesinambungan dalam manajemen rumah sakit.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal. Kompleksitas indikator kinerja dan beban administratif dalam proses pelaporan masih menjadi tantangan besar, khususnya bagi unit pelayanan, terutama tenaga medis yang memiliki keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas utama mereka dalam pelayanan pasien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas E-SAKIP dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain sistem dengan karakteristik organisasi rumah sakit publik [7]. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pencapaian tujuan, perlu adanya penyederhanaan prosedur pelaporan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengelola beban administratif agar lebih efisien.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja rumah sakit publik melalui studi kasus pada RSUD kelas A di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Implementasi E-SAKIP secara umum telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja serta akuntabilitas organisasi rumah sakit.
- b) Pencapaian Tujuan: E-SAKIP berperan penting dalam membantu rumah sakit memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja secara lebih terstruktur. Hal ini terlihat pada peningkatan mutu pelayanan, aksesibilitas layanan, dan pengelolaan sumber daya organisasi yang lebih baik.
- c) Integrasi Sistem: Penerapan E-SAKIP mendorong peningkatan koordinasi internal antarunit kerja rumah sakit, yang didukung oleh proses sosialisasi dan pendampingan. Namun, integrasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan pemahaman antarunit, tumpang tindih format pelaporan, dan ketidakkonsistenan prosedur pelaporan kinerja antarunit.
- d) Adaptasi terhadap Sistem Digital: Rumah sakit telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyesuaikan diri dengan sistem akuntabilitas berbasis digital, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah belum terpusatnya personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan E-SAKIP, yang berdampak pada variasi kualitas dan konsistensi pelaporan kinerja.

Optimalisasi implementasi E-SAKIP, berdasarkan temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa efektivitas sistem ini bergantung tidak hanya pada teknologi digital, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan proses kerja dan beradaptasi dengan perubahan. Untuk itu, perlu penguatan tata kelola internal, termasuk penunjukan unit pengelola yang jelas dan terpusat, penyederhanaan prosedur pelaporan, dan peningkatan koordinasi serta pendampingan berkelanjutan dari instansi pembina. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan implementasi E-SAKIP berjalan optimal dan mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan manajemen rumah sakit publik untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja berbasis digital, sebagai bagian dari reformasi birokrasi

yang berkelanjutan. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit, serta mendukung tercapainya tujuan reformasi sektor kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada manajemen dan seluruh pihak di rumah sakit publik yang menjadi objek penelitian atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan akademik serta dukungan dalam penyempurnaan penulisan artikel ini. Selain itu, penulis menghargai peran editor dan reviewer jurnal atas saran dan umpan balik konstruktif yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas artikel.

REFERENSI

- [1] H. Alaaraj and P. D. F. W. Ibrahim, "The Influence of E-government Practices on good governance from the perspective of Public in Lebanon," *J. Public Adm. Gov.*, vol. 4, no. 3, p. 171, Sep. 2014, doi: 10.5296/jpag.v4i3.6405.
- [2] D. Azriel Setiawan and O. Reviandani, "Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya," *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 2, pp. 416–422, Aug. 2024, doi: 10.57250/ajsh.v4i2.421.
- [3] H. N. F. Agasya and M. Jatnika, "Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, Oct. 2021, doi: 10.47134/villages.v3i1.25.
- [4] I. Kelibay, M. A. A. Kadir, U. Salmah, and S. Nurjannah, "E-Sakip Sebagai Media Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020," *J. Noken Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 11, no. 1, pp. 282–294, Jun. 2025, doi: 10.33506/jn.v11i1.4506.
- [5] Zahrotul Arofah and Muhammad Roisul Basyar, "Penggunaan SAKIP Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kecamatan Genteng," *Eksekusi J. Ilmu Huk. dan Adm. Negara*, vol. 2, no. 3, pp. 106–115, May 2024, doi: 10.55606/eksekusi.v2i3.1200.
- [6] Sefty Maharani Devi and Muhammad Roisul Basyar, "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya," *Birokrasi J. ILMU Huk. DAN TATA NEGARA*, vol. 2, no. 2, pp. 341–352, May 2024, doi: 10.55606/birokrasi.v2i2.1208.
- [7] T. Muriany and V. Ruhunlela, "Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar," *PUBLIC POLICY (Jurnal Apl. Kebijak. Publik Bisnis)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–20, Mar. 2021, doi: 10.51135/PublicPolicy.v2.i1.p1-20.
- [8] P. M. S. Sastra and K. A. Sastra Wijaya, "Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali," *Indones. J. Public Adm. Rev.*, vol. 2, no. 3, p. 11, Jun. 2025, doi: 10.47134/par.v2i3.4147.
- [9] Y. Farida, M. Madani, and N. Tahir, "Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar," *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 3, pp. 961–972, 2022, doi: 10.26618/kimap.v3i3.7405.
- [10] P. P. Donny Jhoniarta, N. P. T. Widanti, and I. M. Sumada, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR," *J. Widya Publika*, vol. 11, no. 2, pp. 113–132, Dec. 2023, doi: 10.70358/widyapublika.v11i2.1089.
- [11] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 2024.
- [12] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 4th ed. London: SAGE Publications, 2018.
- [13] M. Sendika and A. Frinaldi, "TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK: INOVASI MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF," *Soc. J. Inov. Pendidik.*

- IPS*, vol. 5, no. 2, pp. 371–380, Jun. 2025, doi: 10.51878/social.v5i2.5376.
- [14] D. K. Hakim, “Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Banjarnegara,” *J. Pengabd. Tek. dan Sains*, vol. 4, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.30595/jpts.v4i1.21307.
- [15] A. R. Sudrajat *et al.*, “IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) KABUPATEN SUMEDANG,” *J. Reg. Public Adm.*, vol. 7, no. 2, pp. 41–47, 2022.
- [16] M. F. S. Wardhana and Tauran, “Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya,” *Socius - J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 10, pp. 61–73, 2025, doi: 10.5281/zenodo.15351253.